

Quality Assurance of Nonformal Education Financing

KOLOKIUIM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://kolokium.ppj.unp.ac.id/>
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat, Indonesia

Volume 13, Nomor 2, Tahun 2025

DOI: 10.24036/kolokium.v13i2.1194

Received 17 September 2025

Approved 01 November 2025

Published 01 November 2025

Yeni Rohaneni^{1,4}, Iis Prasetyo², Mareta Puspita³

¹ Universitas Negeri Yogyakarta

² Universitas Negeri Yogyakarta

³ Universitas Negeri Yogyakarta

⁴ yeni-rohani187@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of financing quality assurance at the Community Learning Activity Center (PKBM) in South Solok Regency. Through an exploratory qualitative approach, the research was conducted in three PKBMs with different regions. The results show that the implementation of financing quality assurance is quite good in the aspects of implementation and evaluation, but still needs improvement in the aspects of planning and follow-up development. The benefits of the implementation of financing quality assurance are seen in the improvement of service quality, the effectiveness of the use of funds, and the positive impact on the surrounding community. The main obstacle faced is the limited sources of financing that cause dependence on government assistance.

Keywords: Quality Assurance of Financing, PKBM

PENDAHULUAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan nonformal (PNF) di masyarakat. Hadirnya PKBM diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan berinovasi dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kegiatan belajar sepanjang hayat (Susiana & Solfema, 2025). Kamil (2019) juga menyatakan bahwa PKBM sebagai landasan pendidikan masyarakat harus dikembangkan secara mendalam, luwes, serbaguna, dan terbuka bagi semua kelompok umur sesuai dengan peran, keinginan, minat, serta kebutuhan masyarakat.

PKBM memainkan peran penting dalam menyediakan program-program pendidikan yang tidak terlayani oleh pendidikan formal, seperti Pendidikan Anak Usia Dini nonformal, pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), pendidikan kecakapan hidup (lifeskill), dan program pendukung lainnya seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Untuk memenuhi fungsinya, PKBM harus menerapkan manajemen pendidikan yang efektif, mencakup personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, hubungan masyarakat, serta layanan khusus (Mantja, 2005).

Namun, di balik peran ideal tersebut, banyak PKBM menghadapi tantangan fundamental yang mengancam eksistensinya: kerentanan finansial. Fenomena "PKBM on/off"—lembaga yang hanya aktif saat menerima bantuan pemerintah dan nonaktif setelah dana habis—menjadi cerminan dari masalah struktural ini. Keberlangsungan operasional dan kualitas layanan PKBM sangat bergantung pada stabilitas dan kecukupan pembiayaan. Manajemen pembiayaan yang efektif bukan hanya soal administrasi, tetapi menjadi penentu kualitas pendidikan itu sendiri, karena segala aspek pembelajaran memerlukan dukungan dana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar (Abdan et al., 2025).

Untuk memastikan kualitas, pemerintah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang mencakup delapan standar nasional, termasuk standar pembiayaan. Penjaminan mutu, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, adalah upaya sistemik dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹ Dalam konteks pembiayaan, hal ini diwujudkan melalui siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Namun, implementasi siklus ini dalam praktiknya sering kali lebih menekankan pada akuntabilitas penggunaan dana pemerintah, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang menuntut kepatuhan prosedural yang ketat (Amin et al., 2022).

Ketergantungan pada satu sumber pendanaan, terutama dari pemerintah, merupakan sebuah risiko strategis bagi lembaga pendidikan manapun (Mukaromah, 2021). Literatur mengenai manajemen keuangan pendidikan menekankan pentingnya kemandirian finansial melalui diversifikasi sumber dana. Strategi ini dapat mencakup pengembangan unit usaha mandiri (entrepreneurship) dan pembangunan kemitraan (partnership) dengan sektor swasta atau organisasi masyarakat lainnya (Romadhon, 2016). Studi kasus pada Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman menunjukkan bahwa melalui pengembangan berbagai unit bisnis dan kemitraan strategis, sebuah lembaga pendidikan mampu mencapai kemandirian finansial penuh, bahkan membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi ribuan siswanya (Romadhon, 2016). Model ini memberikan kontras yang tajam dengan kondisi mayoritas PKBM yang masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup dari satu siklus anggaran pemerintah ke siklus berikutnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti aspek pembiayaan PKBM. Siswoyo (2012) mendeskripsikan karakteristik sumber dan realisasi anggaran di PKBM Karya Bakti Punung Pacitan. Sementara itu, Meilya et al., (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci kemandirian PKBM di Kota Serang. Permasalahan pendanaan masyarakat sebelumnya sangat beragam yaitu terbatasnya dana pemerintah, perubahan kebijakan, pergantian kepemimpinan, hubungan yang kurang baik dengan pemerintah serta sulitnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (Az Zahra & Tohani, 2024). Meskipun studi-studi ini memberikan wawasan penting, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis keseluruhan siklus penjaminan mutu pembiayaan empat tahap (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) secara terintegrasi.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menginvestigasi sebuah paradoks fundamental: bagaimana kepatuhan prosedural yang tinggi dalam pengelolaan dana pemerintah dapat berjalan beriringan dengan, atau bahkan berkontribusi pada, kelemahan strategis dalam mencapai kemandirian finansial. Dengan melakukan analisis komparatif di tiga PKBM dengan konteks geografis yang berbeda (perkotaan, terluar, dan pinggiran) di Kabupaten Solok Selatan, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana siklus penjaminan mutu pembiayaan diimplementasikan di PKBM Kabupaten

Solok Selatan? (2) Apa manfaat dari implementasi tersebut? (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya?

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif. Metode kualitatif, menurut Sugiyono (2018), adalah metode yang berlandaskan *filsafat post-positivis* yang mempelajari objek-objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Metode ini digunakan untuk menemukan faktor-faktor penting yang menjadi penyebab masalah yang diteliti, dengan tujuan mencari ide atau fenomena yang sedang terjadi dan dapat dijadikan ide baru untuk masalah yang diteliti (Given, 2008).

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan siklus penjaminan mutu pembiayaan di PKBM. Peneliti menggali informasi secara kreatif, fleksibel, dan terbuka serta memperoleh data-data objektif tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pengembangan pembiayaan pada PKBM. Subjek penelitian ini adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta tokoh masyarakat di sekitar PKBM.

Penelitian dilaksanakan di tiga PKBM di Kabupaten Solok Selatan: PKBM At-Tariq Nagari Pulakek Koto Baru, PKBM Gading Sejati Nagari Sungai Kunyit Barat, dan PKBM Fatain Nagari Ranah Pantai Cermin. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli hingga September 2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, serta data sekunder yang diambil dari dokumen, observasi, dan foto terkait tahapan siklus penjaminan mutu pembiayaan PKBM. Sumber data mencakup orang, tempat, kejadian, aktivitas, dokumen, dan benda-benda lain yang relevan dengan siklus penjaminan mutu pembiayaan PKBM. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola PKBM, pendidik/tutor, komite, dan tokoh masyarakat sekitar PKBM, serta melalui dokumen-dokumen terkait pembiayaan seperti dokumen laporan pertanggungjawaban, Buku Kas Umum, dokumentasi, dan administrasi lainnya.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis perilaku individu atau kelompok untuk memperoleh informasi dan data komprehensif. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pengembangan pembiayaan PKBM. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran dokumen terkait kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pengembangan pembiayaan PKBM.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi dengan mengkoordinasikan hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumenter. Triangulasi dilakukan terus-menerus hingga peneliti yakin tidak ada lagi kejanggalan dan tidak ada yang perlu dikonfirmasi dengan sumber data, untuk meningkatkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Matthew Miles dan Michael Huberman, 1992). Metode analisis ini

digunakan untuk mengorganisir data sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang relevan dan akurat.

PEMBAHASAN

Kesenjangan Implementasi Siklus Penjaminan Mutu: Antara Kepatuhan Prosedural dan Kelemahan Strategis

Analisis terhadap tiga PKBM di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam implementasi empat tahapan siklus penjaminan mutu pembiayaan. Ditemukan sebuah pola yang konsisten: PKBM menunjukkan kompetensi tinggi pada tahapan yang bersifat prosedural dan diwajibkan oleh regulasi pemerintah, namun lemah pada tahapan yang menuntut inisiatif strategis dan visi jangka panjang. Ketiga PKBM—At-Tariq, Fatain, dan Gading Sejati—menunjukkan kepatuhan yang sangat baik pada tahap Pelaksanaan dan Evaluasi. Hal ini terlihat dari tertibnya administrasi keuangan, penyusunan Buku Kas Umum (BKU) yang sistematis, dan pelaporan penggunaan dana BOSP yang tepat waktu melalui aplikasi daring pemerintah serta penyerahan salinan fisik ke Dinas Pendidikan setempat.¹ Kemampuan ini secara langsung didorong oleh Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP yang rigid dan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) dari dinas terkait, yang menjadikan kepatuhan sebagai prasyarat untuk pencairan dana tahap berikutnya. (Sutardi et al., 2023).

Sebaliknya, kelemahan mendasar teridentifikasi pada tahap Perencanaan dan Tindak Lanjut Pengembangan. Meskipun penyusunan RKAS telah melibatkan partisipasi tutor dan komite, proses perencanaan cenderung bersifat reaktif dan mekanis, yakni sebatas mengalokasikan estimasi dana BOSP yang akan diterima ke dalam komponen-komponen yang diizinkan oleh Juknis.¹ Perencanaan belum menjadi sebuah proses strategis yang berangkat dari analisis kebutuhan riil dan eksplorasi aktif terhadap berbagai potensi sumber pendanaan. Kelemahan paling fatal terletak pada tahap Tindak Lanjut, yang merupakan motor penggerak menuju kemandirian. Upaya diversifikasi sumber pembiayaan bersifat sporadis dan sebagian besar tidak berhasil. PKBM At-Tariq mencoba merintis unit usaha pengolahan ubi kayu, namun terkendala pemasaran. PKBM Gading Sejati telah menjajaki peluang CSR dari perusahaan sawit di sekitarnya, namun belum membuahkan hasil karena prosedur yang rumit. Sementara itu, PKBM Fatain di wilayah terluar bahkan belum sampai pada tahap identifikasi peluang sumber dana alternatif.

Pola ini mengindikasikan bahwa PKBM terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai "perangkap kepatuhan" (*compliance trap*). Sistem pendanaan pemerintah, dengan penekanannya yang kuat pada akuntabilitas prosedural, secara tidak langsung mengarahkan sumber daya dan perhatian pengelola PKBM untuk fokus pada pemenuhan persyaratan administratif jangka pendek. Akibatnya, kapasitas untuk melakukan perencanaan strategis, membangun kemitraan yang produktif, dan mengembangkan unit usaha yang berkelanjutan menjadi terabaikan. Keterbatasan dana BOSP yang diterima, ditambah dengan beban administrasi pelaporan yang berat, menciptakan sebuah lingkaran setan. Tidak ada surplus dana yang dapat diinvestasikan untuk peningkatan kapasitas (misalnya, pelatihan kewirausahaan atau penulisan proposal hibah), yang pada gilirannya menghambat kemampuan PKBM untuk mengakses sumber pendanaan lain, sehingga memperkuat ketergantungan mereka pada siklus BOSP berikutnya.

Untuk memvisualisasikan kesenjangan ini, analisis komparatif implementasi siklus penjaminan mutu di ketiga PKBM disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Analisis Komparatif Implementasi Siklus Penjaminan Mutu Pembiayaan PKBM

Tahapan Siklus	PKBM At-Tariq (Perkotaan)	PKBM Fatain (Terluar)	PKBM Gading Sejati (Pinggiran)
Perencanaan	Kepatuhan pada Juknis BOSP; RKAS disusun partisipatif namun kurang strategis.	Kepatuhan pada Juknis BOSP; RKAS fokus pada alokasi dana yang ada.	Kepatuhan pada Juknis BOSP & PKW; RKAS lebih kompleks namun masih reaktif.
Pelaksanaan	Sangat Baik: Tertib administrasi, pelaporan BKU sesuai Juknis.	Baik: Tertib administrasi, menghadapi kendala teknis (internet).	Sangat Baik: Tertib administrasi untuk berbagai sumber dana pemerintah.
Evaluasi	Sangat Baik: Laporan tepat waktu, siap untuk monev Dinas.	Baik: Laporan sesuai standar, menghadapi kendala geografis.	Sangat Baik: Laporan lengkap dan akuntabel.
Tindak Lanjut	Lemah: Unit usaha (ubi kayu) belum signifikan; diversifikasi minim.	Sangat Lemah: Belum ada identifikasi peluang; ketergantungan total pada pemerintah.	Cukup: Upaya peninjakan CSR (belum berhasil); berhasil mengakses dana vokasi (PKW).

Manfaat Implementasi: Peningkatan Kualitas Layanan di Tengah Keterbatasan

Meskipun terdapat kelemahan strategis, implementasi manajemen keuangan yang terstruktur, terutama yang didorong oleh regulasi BOSP, tetap memberikan manfaat nyata bagi PKBM dan masyarakat yang dilayaninya. Pengelolaan dana yang akuntabel memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk menunjang kegiatan operasional. Manfaat utama yang teridentifikasi adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan program pendidikan. Dana BOSP memungkinkan PKBM untuk membeli sarana pembelajaran yang dibutuhkan, menyediakan alat dan bahan untuk program keterampilan, serta mengalokasikan honorarium bagi para tutor. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan antusiasme peserta didik.

Selain itu, efektivitas penggunaan dana juga meningkat. Dengan adanya RKAS sebagai pedoman dan laporan pertanggungjawaban sebagai alat kontrol, pengeluaran menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga. Fleksibilitas dalam Juknis BOSP yang tidak lagi menggunakan persentase kaku untuk setiap komponen belanja memungkinkan PKBM mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan mendesak, seperti pengadaan sarana pembelajaran. Manfaat ini juga dirasakan oleh masyarakat luas. Program-program keterampilan yang didanai, seperti program tata boga (*pastry & bakery*) di PKBM Gading Sejati yang didukung oleh dana Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), tidak hanya memberikan keahlian praktis bagi peserta didik tetapi juga membuka peluang wirausaha, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Dengan demikian, meskipun belum mampu mendorong kemandirian, sistem penjaminan mutu yang ada telah berhasil meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan dasar.

Analisis Kendala Struktural dan Operasional dalam Mencapai Kemandirian Finansial

Kegagalan PKBM untuk keluar dari siklus ketergantungan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan internal, tetapi juga oleh kendala-kendala struktural dan operasional yang sistemik. Salah satu kendala struktural yang paling signifikan adalah keterbatasan dalam model pendanaan BOSP itu sendiri. Peraturan yang membatasi pembiayaan hanya untuk peserta didik hingga usia 24 tahun menempatkan PKBM dalam posisi sulit, karena mereka harus melayani semua kelompok usia. Akibatnya, mereka terpaksa melakukan subsidi silang yang menguras anggaran operasional yang sudah sangat terbatas. Selain itu, ekosistem pendukung kemandirian di Kabupaten Solok Selatan sangat lemah. Tidak adanya perusahaan besar yang aktif menyalurkan dana CSR dan ketiadaan skema dana pendampingan dari pemerintah daerah membuat PKBM kehilangan sumber pendanaan alternatif yang potensial.

Kendala operasional turut memperburuk situasi. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas berada di tingkat menengah ke bawah membuat opsi iuran atau program berbayar menjadi tidak realistis (Mustopa, 2022). Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal literasi digital dan manajemen kewirausahaan, juga menjadi penghalang. Lebih jauh, konteks geografis memainkan peran penting sebagai penentu kapasitas inovasi. PKBM Fatain, yang berlokasi di daerah terpencil dengan akses internet dan transportasi yang sulit, menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi sekaligus memiliki peluang kemitraan yang paling minim. Sebaliknya, PKBM Gading Sejati, yang berada di wilayah pinggiran dekat dengan area perkebunan, memiliki akses yang lebih baik untuk menjajaki peluang CSR dan berhasil mengakses program vokasi tambahan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa model pendanaan BOSP yang bersifat "satu ukuran untuk semua" gagal memperhitungkan disparitas geografis, yang berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas antara PKBM di wilayah yang berbeda. Terakhir, kendala birokrasi di tingkat lokal, seperti persyaratan administrasi yang rumit untuk pencairan dana dan pelaporan, sering kali menyebabkan keterlambatan dan menambah beban kerja pengelola, mengalihkan fokus mereka dari kegiatan strategis ke urusan administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi siklus penjaminan mutu pembiayaan di PKBM Kabupaten Solok Selatan menunjukkan sebuah paradoks yang krusial. Lembaga-lembaga ini telah berhasil memenuhi tuntutan akuntabilitas prosedural pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana bantuan

pemerintah. Namun, keberhasilan ini tidak diimbangi dengan kemajuan pada tahap tindak lanjut dan pengembangan, yang tercermin dari kegagalan sistematis dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Akibatnya, sektor pendidikan nonformal di wilayah ini berada dalam kondisi kerentanan finansial yang kronis, dengan keberlangsungan yang sangat bergantung pada kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat. Sistem penjaminan mutu yang ada, meskipun bertujuan baik, secara tidak sengaja telah mendorong fokus pada kepatuhan jangka pendek dan mengabaikan pembangunan kemandirian jangka panjang.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kebijakan dan praktik pendidikan nonformal di Indonesia.

Bagi Pembuat Kebijakan (Dinas Pendidikan dan Pemerintah Pusat): 1) Penyederhanaan Birokrasi: Perlu adanya penyederhanaan persyaratan administrasi dalam pelaporan dan pencairan dana BOSP. Beban administrasi yang berlebihan menyita waktu dan energi pengelola yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis seperti penggalangan dana dan pengembangan kemitraan; 2) Menciptakan Insentif untuk Kemandirian: Kebijakan pembiayaan perlu direorientasi untuk tidak hanya menuntut akuntabilitas, tetapi juga mendorong kemandirian. Pemerintah dapat merancang skema insentif, seperti dana hibah kompetitif atau dana padanan (*matching grants*), bagi PKBM yang berhasil menggalang dana dari sumber non-pemerintah atau mengembangkan unit usaha yang profitable; 3) Berperan sebagai Fasilitator Kemitraan: Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif menghubungkan PKBM dengan potensi mitra dari dunia usaha dan industri untuk program CSR atau kemitraan lainnya.

Bagi Praktisi (Pengelola PKBM): 1) Pergeseran Paradigma: Pengelola PKBM perlu mengubah paradigma dari sekadar administrator dana bantuan menjadi manajer strategis dan wirausahawan sosial. Fokus harus diperluas dari pemenuhan laporan menjadi penciptaan nilai dan pencarian peluang baru; 2) Peningkatan Kapasitas: Pengelola dan staf PKBM perlu secara proaktif mencari dan mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen keuangan strategis, penulisan proposal hibah, pengembangan bisnis sosial, dan pemasaran digital untuk mendukung unit usaha; 3) Membangun Jaringan secara Strategis: Kemitraan yang ada saat ini cenderung bersifat non-finansial. PKBM harus mulai membangun jaringan secara strategis dengan tujuan eksplisit untuk penggalangan dana, mencontoh praktik terbaik dari lembaga yang telah mandiri secara finansial.

Bagi Penelitian Selanjutnya: 1) Dianjurkan untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar untuk mengukur secara statistik hubungan antara beban administrasi pelaporan BOSP dengan tingkat diversifikasi sumber pendanaan PKBM; 2) Studi longitudinal dapat dilakukan untuk melacak dampak dari program pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan terhadap tingkat kemandirian finansial PKBM dalam jangka waktu beberapa tahun; 3) Diperlukan lebih banyak studi kasus tentang model-model kewirausahaan PKBM yang berhasil di berbagai konteks di Indonesia untuk dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut.

REFERENSI

Abdan, S., Ahmadi, & Supriadi, A. (2025). *Manajemen Pembiayaan di Lembaga Pendidikan Non-Formal*. 9(1). <https://doi.org/10.30997/jtm.v9i1.18214>

- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Jurnal RISM4*, 2(1), 166–174.
- Az Zahra, U. L., & Tohani, E. (2024). *Strategi Pendanaan Masyarakat dalam Pengelolaan PKBM di Kalimantan Barat*. 8(March 2024), 67–85.
- B. Matthew Miles dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP.
- Given, L. M. (2008). *he Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publications Ltd.
- Kamil, M. (2019). *Pendidikan Non Formal pengembangan melalui PKBM*. Alfabeta.
- Mantja, W. (2005). *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Wineka Media.
- Meilya, I. R., Siregar, H., & Fauzi, A. (2021). Profil Kemandirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Di Kota Serang Banten. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 8(1), 34–41. <https://doi.org/10.36706/jppm.v8i1.13860>
- Mukaromah, 'Uliyatul. (2021). Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Sumber Dana Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Babadan Ponorogo. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 113–121. <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i2.2994>
- Mustopa, A. S. (2022). Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan PKBM (Studi Tentang Efektivitas Pengelolaan PKBM Bonti Sukses Abadi, PKBM Setia Mandiri dan PKBM Peduli Anak Bangsa di Kota Bandung) Abduloh Sidik Mustopa1. *EDUKASLA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 313–324.
- Romadhon, A. (2016). Kemandirian Finansial Lembaga Pendidikan Melalui Entrepreneurship Dan Partnership. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1197–1204. <https://doi.org/10.21009/jmp.v7i1.1814>
- Siswoyo, H. (2012). *Pengelolaan Pembiayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Studi Situs PKBM Karya Bakti Punung Pacitan)*.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif dalam Sugiyono, metode Penelitian kualitatif. In *CV jejek* (Vol. 2, Issue 2). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Susiana, A., & Solfema, S. (2025). Contribution of work climate and leadership towards tutor performance in PKBM district in Pasaman district. *KOLOKIU Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1), 210–234. <https://doi.org/10.24036/kolokium.v13i1.1055>
- Sutardi, D., Sisman, Aprianty, H., & Noviyanto, H. (2023). Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. *Sengkuni Journal: Social Sciences and Humanities*, 4(2), 239–246.